

**BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *juncto*
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :
SYAHRIL ROMADHI
2018010022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

202

**BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *juncto*
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

SYAHRIL ROMADHI

2018010022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2022

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Oleh : Syahril Romadhi
NIM : 2018010022
Judul : Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi
Ditinjau dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *juncto* Undang-
Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Skripsi.

Gresik, 18 Januari 2022

Pembimbing I



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY: 107102019950020

Pembimbing II



Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY: 107102019890015

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : SYAHRIL ROMADHI
2. NIM : 2018010024
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Beban Pembuktian Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
7. Pembimbing II : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
8. Konsultasi :

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penelitian		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

9. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
10. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY: 107102019950020

Pembimbing II

Moh. Nasichin, S.H., M.H.

NIPY: 107102019890015

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY: 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul : **BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi Oleh : Syahril Romadhi

NIM : 2018010022

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal 11 Juli 2022.

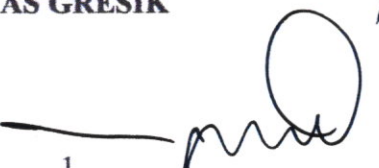
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.

NIPY: 107102020120030


Ketua

1. 

2. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY: 107102019950020

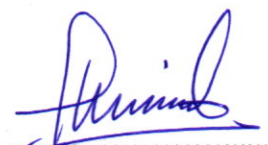
Anggota

2. 

3. Arkisman, S.H., M.H.

NIPY: 107102019890015

Anggota

3. 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : SYAHRIL ROMADHI
NIM : 2018010022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Beban Pembuktian Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 01 September 2022



Syahril Romadhi
NIM. 2018010022

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SYAHRIL ROMADHI
NIM : 2018010022
Program Studi : Ilmu Hukum
(S1) Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 01 September 2022

Yang menyatakan



SYAHRIL ROMADHI
NIM. 2018010022

MOTTO

Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa Undang-Undang sekalipun. (bm taverne)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim... Alhamdulillah...

Sebuah pencapaian karya kecil ini saya persembahkan yang pertama kepada Allah SWT dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin atas limpahan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini juga saya persembahkan untuk keluarga, terutama kedua orang tua saya. Terimakasih atas semangat dan dukungan luar biasa yang selalu diberikan hingga akhirnya skripsi ini berhasil terselesaikan. Akhirnya saya bisa menjawab kekhawatiran bapak ibu dengan bukti bahwa saya bisa lulus tepat di semester 8.

Terima kasih yang tak terkira saya tujukan kepada dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. dan Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kebaikan hati yang luar biasa saat membimbing saya sehingga skripsi ini terselesaikan. Motivasi singkat yang beliau berikan saat bimbingan adalah motivasi saya untuk terus semangat.

Terima kasih untuk teman-temanku satu bimbingan. Terimakasih sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ketakutan kita adalah sumber kekuatan kita untuk terus maju hingga skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik. Judul pada penelitian ini adalah “Beban Pembuktian Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 01 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Korupsi terjadi karena adanya celah dan kesempatan yang akan dijadikan sebagai peluang oleh para koruptor. Sesuai dengan definisi korupsi yang berarti merusak, maka sebagai objek dalam penelitian akan merusak negara dan merugikan masyarakat. Beban pembuktian terbalik dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan dan menetapkan kebenaran yang sesungguhnya dalam sebuah putusan pengadilan. Proses beban pembuktian dalam pengadilan sangat efektif digunakan, karena semua dilakukan dengan berlandas pada alat bukti yang digunakan sebagai pembelaan oleh orang yang bersangkutan. Pembuktian terbalik juga dapat digunakan dalam kasus gratifikasi sebagai cara membuktikan dan sandaran guna menarik kesimpulan tentang objek yang dibuktikan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum bersifat normatif, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Objek yang digunakan yaitu kasus gratifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang dibebani membuktikan pula objek pembuktiannya. Melalui pembuktian terbalik ini siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan keterangan tentang asal-usul hartanya. Dalam kasus gratifikasi, sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistem ini berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).

Kata Kunci: Beban; Pembuktian; Sanksi; Pidana; Korupsi

ABSTRACT

Corruption occurs because there are gaps and opportunities that will be used as opportunities by corruptors. In accordance with the definition of corruption which means to destroy, then as an object in research it will damage the state and harm the community. The inverse burden of proof can be used as a tool to find and establish the real truth in a court decision. The burden of proof process in court is very effectively used, because everything is done based on the evidence used as a defense by the person concerned. Reverse proof can also be used in the case of gratification as a means of proving and as a basis for drawing conclusions about the object being proven.

The type of research used is normative research. Legal research is normative, so the author will use the type of normative research, which is a research that is focused on examining positive legal research, in this case is written legal material, especially those related to Corruption Crimes. This research is aimed only at written regulations or other legal materials. In this thesis research, the law used is Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law Number 20 of 2011 concerning the Crime of Corruption. The object used is the case of gratification.

The results of the study indicate that the subject who is burdened with proving is also the object of proof. Through this reverse proof, anyone who commits a criminal act of corruption is obliged to provide information about the origin of his assets. In the case of gratification, the reverse proof system is only applied to criminal acts relating to gratification related to bribery. This system is based on the principle of presumption of guilt.

Keywords: burden, proof, penalty, criminal, corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KARTU BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEORISINILAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II. PENGATURAN DAN PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIANDALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 <i>juncto</i> UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
2.1 Tindak Pidana Korupsi	18
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2.1.2 Sejarah Tindak Pidana Korupsi	22
2.1.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	24
2.1.4 Unsur dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi	25
2.2 Pembuktian Terbalik	27
2.2.1 Pengertian Pembuktian Terbalik	27
2.2.2 Sejarah Pembuktian Terbalik	33

2.2.3	Beban Pembuktian dan Sanksi	35
2.2.4	Asas Beban Pembuktian Terbalik	37
2.2.5	Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	40
BAB III. PENERAPAN PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI		
3.1	Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik	51
3.2	Pemberantasan Korupsi di Indonesia	56
3.3	Penerapan Pembebanan Terbalik	59
BAB IV. PENUTUP		
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		84